

DISKURSUS DEMOKRATISASI INDONESIA PASCA ORDE BARU

Yeby Ma'asan Mayrudin
Dosen Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Jalan Sunter Permai Raya, Jakarta Utara

Email: yeby.mayrudin@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini menelaah persoalan runtuhnya rezim otoritarian Soeharto yang memicu terjadinya proses transisi yang mengarah ke demokrasi. Dalam mengurai tentang fenomena demokratisasi di Indonesia yang melangkah ke arah konsolidasi demokrasi, harus melihat dari beberapa perspektif, di antaranya ekonomi, budaya, agama, dan lain sebagainya. Akan tetapi, tulisan ini akan fokus mengkaji konsolidasi demokrasi di Indonesia hanya dalam perspektif politik. Di antaranya, legitimasi kekuasaan, partisipasi masyarakat, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik.

Kata kunci: Partai Islam, Politik Identitas, *Catch-all*

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah wacana politik yang sangat penting pada akhir abad ke 19. Sebagian, ini disebabkan oleh karena konsep politik lainnya telah mengalami kelesuan intelektual, dan sebagian lainnya karena wacana demokrasi telah dihubungkan dengan isu hak asasi manusia, kebebasan, persamaan dan lain sebagainya. Demokrasi memiliki kekuatan memaksa, dorongan ke arah demokrasi telah menjadi ciri penting perjalanan abad ke 20 yang menginginkan pertumbuhan ke arah yang lebih baik untuk semua.¹ Untuk menuju pertumbuhan itu, masyarakat dalam suatu negara, harus melakukan perubahan-perubahan yang fundamental (mendasar).

Sebagaimana biasanya perubahan bertahap dan tak dipaksakan lebih baik dibanding perubahan tiba-tiba dan dipaksakan. Demokrasi muncul dalam langkah-langkah lamban.²

¹ Lihat Louis Irving Horowitz. *Revolusi, Militerisasi dan Konsolidasi Pembangunan*, Penerjemah Sahat Simamora (Jakarta: PT Bina Aksara, 1985) hal. 270

² Bernard Lewis, *et.al. Islam Liberalisme Demokrasi Membangun Sinerji Warisan Sejarah, Doktrin dan Konteks Global*, penerjemah Mun'im A. Sirry (Jakarta: Paramadina, 2002) hal. 59

Karena itu, konsolidasi demokrasi di Indonesia harus melewati proses transisi terlebih dahulu. Nilai-nilai yang dianggap anti-demokrasi atau tidak demokratis harus dihilangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekarang ini, masih banyak yang berpikir bahwa Indonesia masih dalam proses transisi, padahal ketika kebebasan politik, persamaan hak dan kedaulatan rakyat terjadi dengan baik, komponen maupun elemen masyarakat bergerak begitu progresif, maka apakah Indonesia masih dalam fase transisi ataukah sudah masuk dalam fase konsolidasi demokrasi? Inilah yang menjadi ketertarikan penulis dalam menegaskan indikator-indikator untuk menjawab pertanyaan tersebut melalui perspektif politik.

MELACAK MAKNA DEMOKRASI

Makna kata demokrasi adalah “kekuasaan oleh rakyat”. Istilah ini pertama kali dipakai pada abad kelima SM oleh sejarawan Yunani kuno, yaitu Herodotus, dengan memadukan kata *demos*, yang berarti “rakyat”, dan *kretein*, yang berarti “berkuasa”. Definisi terkenal tentang demokrasi oleh Abraham Lincoln adalah “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Dengan mengelaborasi gagasan tentang pemerintahan atau kekuasaan, demokrasi dimaknai sebagai sistem politik di mana seluruh rakyat membuat, dan berhak membuat, keputusan dasar mengenai soal-soal penting dalam kebijakan publik.³ Sebagai mana yang terjadi di Indonesia, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) merupakan lembaga representasi rakyat dalam mengambil suatu kebijakan publik. Dan rakyatlah yang telah memilih mereka menjadi anggota dewan untuk mewakili kepentingan rakyat tersebut. Tidak hanya sampai di sana, presiden dan wakil presiden pun, dipilih secara langsung oleh rakyat.

Menurut Robert A. Dahl, demokrasi adalah sistem yang di dalamnya rakyat memiliki kedaulatan sama dan tidak membedakan satu dengan lainnya, demokrasi juga merupakan sistem pemerintahan dengan jumlah yang cukup besar bagi warga negara untuk berhak ikut serta dalam proses-proses politik.⁴ Selaras dengan itu, Jean J. Rousseau, berpendapat bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang seluruh rakyatnya memegang kekuasaan dan memiliki kebebasan politis, artinya kekuasaan untuk berbuat

³ William Outhwaite (ed.) *Kamus Lengkap Pemikiran Sosial modern*, Penerjemah Tri Wibiwo (Jakarta: Kencana, 2008) hal. 197

⁴ Lihat Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992) hal 3-4

apapun sesuai dengan keinginannya asal tidak bertentangan dengan hukum.⁵ Sedangkan menurut Miriam Budiarjo, makna demokrasi ialah kebebasan manusia terhadap segala bentuk kekangan, serta menjamin hak asasi manusia bagi setiap individu, dan negara turut bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat.⁶

Di dalam negara-negara demokratis modern orang tidak lagi mempersoalkan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses demokratis. Begitu juga bukan hal baru bahwa pemerintahan harus dilegitimasi dengan hukum.⁷ Para ilmuwan politik barat telah meletakkan beberapa kriteria sebagai dasar bagi demokrasi, termasuk tingkat partisipasi politik, pemilu, partai-partai politik, kelompok kepentingan, pemisahan kekuasaan, *checks and balances*, penghargaan terhadap HAM, hak-hak minoritas, kebebasan berbicara, kebebasan berpolitik dan lain sebagainya.⁸

Di samping itu, secara cermat David E. Apter, mencoba melakukan pengamatan tentang prinsip-prinsip dasar demokrasi, menurutnya;

“Kekuasaan adalah kekuatan yang dapat dipakai dan dikendalikan. Persoalan besar dalam sejarah adalah mengubah kekuasaan mutlak untuk dipakai secara demokratis. Kekuasaan merupakan dasar politik. Dalam demokrasi, pemakaiannya harus sesuai dengan patokan-patokan kewajaran atau keadilan. Hal ini selanjutnya tercermin dalam hukum. Hukum menciptakan wewenang dan memungkinkan perwakilan menjadi sarana pembuatan hukum. Selanjutnya jika perwakilan berdasarkan pada persamaan, maka ia akan mendorong kebebasan dan demokrasi itu sendiri. Demokrasi adalah sistem yang menjamin kebebasan. Kebebasan-kebebasan ini diabadikan dalam hak-hak, yang diungkapkan secara politik dalam perwakilan. Dalam demokrasi melalui kedaulatan rakyat hak menimbulkan wewenang, suatu wewenang yang didukung oleh hukum. Hasilnya adalah sebuah sistem ketertiban yang menjadi landasan yang memungkinkan dijalankannya kekuasaan serta ditetapkannya asas-asas kewajaran atau keadilan.”⁹

⁵ Jean Jaques Rousseau, *Perihal Kontrak Sosial*, Penerjemah Ida Sundari (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1989) hal. 126

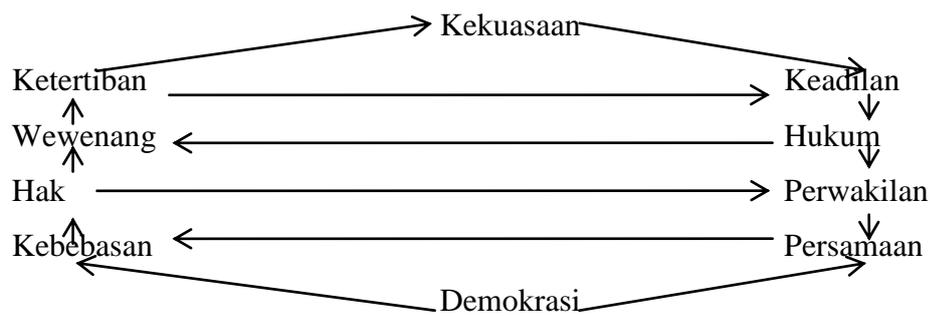
⁶ Lihat Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia, 1985) hal. 53

⁷ F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif* (Yogyakarta: Kanisius, 2009) Hal. 121

⁸ Termasuk Robert A. Dahl, *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol*; Guillermo O'Donnell dan Phillippe C. Scmitter, *Transisi Menuju Demokrasi: Kasus Eropa Selatan*, Penerjemah Hartono (Jakarta: LP3S, 1992) hal. 156; Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, (Jakarta: Grafiti, 1995); Lihat Anas Urbaningrum, *Islam-Demokrasi Pemikiran Nurcholish Majid* (Jakarta: Republika, 2004) hal. 17-29; Lihat juga tulisan Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media, 2005) hal. 110-125

⁹ David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik*, penerjemah Setiawan Budi (Jakarta: LP3S, 1987) hal. 137

Gambar 1. Prinsip-prinsip dasar Demokrasi.¹⁰



Sumber: David E. Apter, Pengantar Analisa Politik, hal. 137

Landasan yang satu sama lain saling berkaitan dan saling memperkuat ini, termasuk pada nilai-nilai yang ada dalam demokrasi, seperti *persamaan dan demokrasi menjamin kebebasan. Ketertiban dan kekuasaan menjamin keadilan. Keadilan dan kebebasan merupakan variabel-variabel yang menentukan. Persamaan dan ketertiban merupakan variabel-variabel bergantung.*¹¹ Lambat laun demokrasi diakui sebagai sebuah sistem nilai kemanusiaan yang paling menjanjikan masa depan umat manusia yang lebih baik pada saat ini. Dasarnya adalah karena demokrasi sesuai dengan tuntutan-tuntutan kebutuhan ‘non-material’ manusia. Nilai-nilai demokrasi akan dapat memanusiaikan manusia (*humanization or man*), sebab nilai-nilainya bertitik tolak dari ‘nilai-nilai luhur’.¹²

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Kajian teori dan konsep tentang demokrasi mulai bergaung ketika terjadi transisi ke demokrasi yang mulai marak pasca perang dunia kedua, ketika banyak rezim otoritarian tumbang dari kursi kekuasaannya. Pada saat itu, para ahli atau peneliti ilmu politik beralih dari semula hanya titik Eropa dan Amerika saja, akhirnya berubah mengalihkan penelitian pada perkembangan demokrasi di Eropa Selatan, kemudian Amerika Latin dan Asia.¹³ Arus demokrasi bagai angin segar dalam situasi gersang yang penuh kesewenang-wenangan sang penguasa.

¹⁰ David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik*, hal. 137

¹¹ David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik*, hal. 137

¹² Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007) hal. 296

¹³ Lihat Guillermo O’Donnell dan Philippe C. Schmitter, *Transisi Menuju Demokrasi: Kasus Eropa Selatan*. Penerjemah Hartono (Jakarta: LP3S, 1992) dalam Gregorius Sahdan, *Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto*. (Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2004) hal. 12

Gelombang demokrasi itu, akhirnya sampai juga di Indonesia. Melacak perjalanan demokrasi di Indonesia bisa dilihat dalam empat periode, yaitu:

a. *Demokrasi pada periode 1945-1959*

Demokrasi pada saat ini dikenal dengan sebutan Demokrasi Parleментар. Sistem parlementer yang berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950, ternyata kurang cocok di Indonesia. Persatuan yang dapat digalang selama menghadapi musuh bersama dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan-kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan tercapai.¹⁴ Kendala yang dihadapi pada masa ini adalah konflik kepentingan beberapa kelompok yang ingin mendapatkan kekuasaan. Kelompok yang terorganisir dalam infrastruktur politik ini, tidak lain adalah partai politik. Sebagai wadah penyalur aspirasi rakyat, seyogyanya partai politik menjadi pembuka gerbang bagi stabilitas nasional mulai dari ekonomi, politik maupun keamanan. Secara realitas historis yang terjadi malah sebaliknya, ekonomi mengalami krisis, politik mengalami disorientasi karena beberapa kali terjadi perubahan dalam kabinet, sehingga stabilitas keamanan juga terganggu.

Instabilitas politik yang tinggi ini telah pula memprihatinkan militer. Kelompok yang berkepentingan menjaga keutuhan negara ini mulai menunjukkan keinginannya untuk turut serta dalam kepolitikan sipil. Untuk mengakhiri keadaan gawat ini, akhirnya Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945.¹⁵ Alhasil kabinet pada waktu itu dibubarkan dan Presiden kembali menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Republik Indonesia. Secara individual, sosok Soekarno yang keras dan prinsipil seperti itu mampu kita maklumi. Akan tetapi, tidak begitu elok bagi tokoh besar sang proklamator kemerdekaan yang menjadi panutan bertindak layaknya seorang diktator.

b. *Demokrasi pada periode 1959-1965*

Ciri-ciri dari pemerintahan ini adalah dominasi dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Dekrit presiden 5 Juli 1959 dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang

¹⁴ TIM ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, hal 130

¹⁵ Alfian dan Nazaruddin Sjamsuddin. *Profil Budaya Politik Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991) hal. 172

kuat.¹⁶ Pandangan Bung Karno ini, menimbulkan sikap yang variatif dari masyarakat, ada yang pro dan bahkan ada yang kontra. Demokrasi terpimpin memang kontroversial, sosok Soekarno yang kharismatik mampu membuat sebagian masyarakat mengapresiasi tindakan itu. Meskipun demikian, ada beberapa tokoh nasional yang berbeda dengan Soekarno, termasuk H. Agus Salim, Mohammad Roem dan Mohammad Hatta. Haji Agus Salim mengatakan:

“Negara selalu membutuhkan bantuan rakyat, karena urusan dalam Negara akan bertambah banyak dan berat. Pemerintah tidak akan berdiri jika tanpa bantuan rakyat. Apabila pemerintah sungguh bertentangan dengan rakyat, maka berarti dia mendorong rakyat untuk melawan dan menumbangkan pemerintah tersebut. Rakyat hanya akan mendukung orang yang akan membawa perubahan-perubahan yang menjadi kehendak dan tujuan rakyat”.¹⁷

Begitu pula dengan pandangan Mohammad Roem, ia berpendapat bahwa demokrasi terpimpin merupakan awal dari kediktatoran.¹⁸ Sementara itu, Bung Hatta juga berpendapat bahwa tindakan Soekarno tersebut merupakan langkah kudeta karena bertentangan dengan konstitusi. Tetapi dengan alasan bahwa revolusi belum selesai, maka susunan pemerintahan yang ada dipandang Soekarno masih bersifat sementara. Alasan itulah dipakai Soekarno untuk melegitimasi (mensahkan) tindakannya.¹⁹

c. *Demokrasi pada periode 1965-1998*

Landasan formal pada periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta ketetapan-ketetapan MPRS. Dalam usaha meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang telah terjadi pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin, kita (pemerintah) telah mengadakan tindakan korektif.²⁰ Akan tetapi, menurut William R. Liddle, terjadi kesenjangan yang bersifat ideologis. Demokrasi Pancasila, betapapun seringnya jadi topik di dalam pembahasan pidato, lebih terasa sebagai harapan normatif ketimbang sistem nilai yang teruji dalam memberi penilaian dan sanksi berbagai peristiwa. Sementara itu di lingkungan ilmuwan politik, sebagai konsep, demokrasi memiliki sekian ciri serta syarat yang kadang tidak cocok benar dengan yang

¹⁶ TIM ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, hal 131

¹⁷ Dwi Purwoko dkk, *Negara Islam: Percikan Pemikiran: H. Agus salim, KH. Mas Mansyur, KH. Hasyim Asy'ari dan Muhammad Natsir* (Jakarta: PT Permata Artistika Kreasi, 2001) hal. 117

¹⁸ Muehtar Lubis, *Hati Nurani Melawan Kezalimaan*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1986) hal 44. Dalam Dwi Purwoko dkk, *Nasionalis Islam vs Nasionalis Sekuler* (Jakarta: PT Permata Artistika Kreasi, 2001) hal. 45

¹⁹ Badri Yatim, *Soekarno, Islam dan Nasionalisme* (Jakarta: Logos, 1999) hal. 46

²⁰ TIM ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, hal 133

berkembang di Indonesia pada saat itu.²¹ Pandangan Liddle tersebut, sebenarnya ingin menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia era Orde baru adalah “demokrasi palsu” yang dibuat untuk keperluan melanggengkan kekuasaan rezim tersebut. Demokrasi Pancasila hanya ada pada tataran teori saja, akan tetapi pada prakteknya, rezim orde baru bertindak otoriter. Atas nama pembangunan dan stabilitas nasional, kebebasan berekspresi baik berpendapat maupun berpolitik pada masa orde baru sangat sulit diwujudkan.

Menurut Prof. Din Syamsudin, mekanisme dikeluarkannya ideologi pembangunan merupakan argumentasi pentingnya stabilitas nasional bagi kesuksesan dan kelanjutan pembangunan yang dicanangkan oleh penguasa. Dengan demikian aksentuasi stabilitas nasional telah menjadi salah satu karakteristik rekayasa politik orde baru. Pelembagaan politik dalam hal ini tercermin dalam pendekatan keamanan dan bersifat monolitik yang dipraktikkan oleh pemerintah orde baru. Akibatnya derajat partisipasi politik telah melemah terutama karena partai-partai politik, sebagai sarana bagi ekspresi politik, tidak mampu mengartikulasikan kepentingan-kepentingan politik rakyat, karena faktor-faktor tersebut.²²

Kekuasaan orde baru berjalan lama karena memang mempunyai beberapa konsep dalam menjalankan roda kebijakan nasionalnya. Strategi politik yang dipakai oleh orde baru adalah strategi penaklukan (melakukan kontrol), strategi pembatasan dan strategi kooptasi atau melakukan penyerapan.²³ Hal yang dilakukan pertama kali oleh rezim Orde Baru adalah menaklukkan (mengontrol) setiap tingkah laku individu agar tidak melawan terhadap kebijakan pemerintah. Karena itu, hak dalam kebebasan berpendapat sangat dikontrol seperti pembredelan Pers dan sering kali rezim orde baru bertindak refresif. Selanjutnya rezim melakukan pembatasan akses gerak langkah masyarakat baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan, seperti diskriminasi terhadap warga Tionghoa, departisipasi politik islam, dan lain sebagainya. Dan melakukan kooptasi dari berbagai kekuatan politik yang ada untuk menjadikan bagian dari kekuatan politik penguasa seperti ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia), PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia), HKTI (Himpunan kelompok Tani Indonesia), KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) dan lain sebagainya.

²¹ R. William Liddle. *Islam, Politik dan Modernisasi* (Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 1997) hal. 183

²² M. Din Syamsudin, *Islam dan Politik: Era Orde Baru*, (Jakarta: Logos, 2001) hal. 65

²³ Dadang Juliantara, *Negara Demokrasi Untuk Indonesia*. (Jawa Tengah: Pondok Edukasi, 2002) hal. 77

d. *Demokrasi pada periode 1998 sampai sekarang*

Runtuhnya rezim otoriter Orde Baru, maka telah membawa harapan baru bagi tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Bergulirnya reformasi yang mengiringi keruntuhan rezim tersebut menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi di Indonesia. Transisi demokrasi merupakan fase krusial yang kritis, karena dalam fase ini akan ditentukan ke arah mana demokrasi akan dibangun.²⁴ Perkembangan yang terjadi setelah pemilu 1999 memperlihatkan bahwa demokratisasi telah menjadi euphoria yang menghinggapi masyarakat Indonesia. Di mana-mana muncul demam kebebasan dan melucuti segala ketidakadilan.²⁵

Membincang demokrasi pada era reformasi bisa dilihat secara empiris, pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur)²⁶ –melakukan pencabutan Tap MPR tentang Komunisme, dihilangkannya diskriminasi negara terhadap warga Tionghoa- yang kemudian digantikan oleh Megawati Soekarnoputri, Selanjutnya pada Pemilu 2004 dimenangkan oleh pasangan SBY-JK. Setelah itu, melalui pergulatan politik yang sangat panas pada pemilu Presiden 2009 dengan kandidat Mega-PRO (Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto), SBY-BOEDIONO (Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono) dan JK-WIN (Jusuf Kalla-Wiranto), pada akhirnya berhasil dimenangkan oleh SBY-BOEDIONO.

KONSOLIDASI DEMOKRASI DI INDONESIA

Salah satu ciri wacana politik abad ke-20 adalah kenyataan bahwa hampir semua gerakan politik mengklaim bersifat “demokratis” dan mengembangkan “demokrasi”. Hampir tak ada kelompok politik yang dapat menghindari atau bahkan menolak klaim ini. Alasan yang mendasari fenomena ini adalah gagasan sentral demokrasi bahwa semua kekuasaan diberikan oleh rakyat, dan bahkan penggunaan kekuasaan hanya sah jika ia mewakili kehendak rakyat. Hampir setiap kelompok politik tidak berani menghindari atau menolak asumsi dasar tersebut.²⁷

²⁴ TIM ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, hal 135

²⁵ Dwi Purwoko dkk, *Nasionalis Islam vs Nasionalis Sekuler*, hal. 77

²⁶ Pada akhirnya Gus Dur yang kontroversial digulingkan juga lewat kasus Bruneigate dan Buloggate yang dikonstitusionalkan melalui Memorandum I, Memorandum II dan Sidang Istimewa MPR RI. Lihat Inu Kencana Syafe'i dan Azhari, *Sistem Politik Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2006) hal. 54

²⁷ Ulil Abshar Abdalla (ed.) *Islam & Barat: Demokrasi dalam Masyarakat Islam*. (Jakarta: FNS Indonesia, 2002) hal. 109

Sebenarnya, ada banyak variasi sistem atau rejim politik. Arief Budiman menegaskan, pada dasarnya, variasi sistem-sistem ini dapat dikembalikan pada dua kelompok dasar, yakni sistem politik yang otoriter (Kekuasaan Negara) dan sistem politik yang demokratis (Kedaulatan Rakyat).²⁸ Ketika era reformasi bergulir, tuntutan untuk demokratisasi di Indonesia bergulir dengan pesat. Selaras dengan pandangan Arif Budiman, bahwa demokrasi ialah kedaulatan rakyat, jadi rakyat sendirilah yang berhak menentukan jalan hidupnya masing-masing. Kedaulatan bukan lagi milik negara –seperti era orde baru– akan tetapi kedaulatan harus ada di tangan rakyat.

Proses Transisi menuju Konsolidasi tidak selalu bersifat linear. Dalam banyak kasus, setelah transisi dikatakan berakhir, masih terdapat banyak tugas yang harus diselesaikan, kondisi yang harus diciptakan, dan sikap serta kebiasaan yang harus diperkuat sebelum demokrasi bisa dianggap terkonsolidasi.²⁹ Menurut Larry Diamond, konsolidasi adalah;

“Proses dengan apa demokrasi mendapatkan legitimasi yang luas dan kuat dari warga negara, sehingga sangat kecil kemungkinannya ia akan ambruk. Proses itu melibatkan perubahan perilaku dan institusi yang menormalkan politik yang demokratis dan mengurangi tingkat ketidakpastiannya. Normalisasi tersebut menuntut perluasan akses yang dimiliki oleh warga negara, tumbuhnya budaya dan kewarganegaraan yang demokratis, pelebaran ruang rekrutment dan pelatihan kepemimpinan, dan fungsi-fungsi lain yang dimainkan oleh civil society”.³⁰

Indikator-indikator yang disampaikan oleh Larry Diamond, membuka mata kita mengenai Indonesia dalam konsolidasi demokrasi. *Pertama*, legitimasi kekuasaan berhasil didapatkan oleh pemerintahan SBY-BOEDIONO, yang pada Pemilu Presiden lalu mendapatkan suara dengan signifikansi yang tinggi dari rakyat secara langsung jika dibanding dengan pasangan kandidat Capres-Cawapres lainnya. Dalam hal ini, legitimasi kekuasaan pemerintahan SBY semakin kokoh dan memang sangat kecil terjadi instabilitas politik (terbukti pada kasus Bank Century).

²⁸ Arief Budiman, *Teori Negara: Negara, kekuasaan dan Ideologi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997) hal. 38

²⁹ Mun'im A. Sirry, *Dilema Islam Dilema Demokrasi: Pengalaman Baru Muslim Dalam Transisi Indonesia* (Bekasi: Gugus Press, 2002) hal. 93

³⁰ Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation* (London: The Johns Hopkins University Press; 1999) dalam Saiful Mujani, *Muslim Demokrat, Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007) hal. 221-222

Kedua, semakin banyaknya individu maupun lembaga yang ikut berpartisipasi dalam mengawal demokratisasi menuju konsolidasi demokrasi. Atas dasar Hak Asasi Manusia, individu diberi ruang kebebasan dalam mengekspresikan sikap politiknya yang berbeda dengan orang lain. Begitu juga dengan peranan lembaga-lembaga kemasyarakatan (LSM maupun *Civil Society*) sebagai *Non-Government Organization* (NGO) –ICW (*Indonesian Corruption Watch*) adalah salah satu LSM yang saat ini mempunyai peranan sangat signifikan- yang memiliki kontribusi penting dalam proses Konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Selain itu, menurut Syaiful Mujani, agar demokrasi terkonsolidasikan, warga negara diharapkan menjadi seorang yang setia, yakni yang tertarik pada politik dan percaya pada institusi politik.³¹ Kepercayaan masyarakat yang lemah terhadap partai politik akan menyebabkan demokrasi juga melemah, dari sini partai politik harus memainkan peranan-peranan dan fungsi-fungsinya yang strategis. Pemilu 2009 merupakan titik penentu bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia, dengan angka 70,1%³² suara dari keseluruhan jumlah suara pada pemilu legislatif, merupakan nilai yang cukup untuk mempertahankan dan melanjutkan konsolidasi demokrasi. Selaras dengan ini, Robert A. Dahl mengatakan, “*Bahwa di dalam demokrasi dibutuhkan organisasi-organisasi yang bebas, paling tidak dalam demokrasi berskala luas. Apabila proses-proses demokratis digunakan secara luas seperti negara bangsa, maka organisasi-organisasi yang otonom pasti akan terwujud*”.³³

Selanjutnya, diperlukan upaya konsolidasi demokrasi untuk membendung kecenderungan negatif dengan terus menata format kelembagaan demokrasi yang mampu menarik minat pada pelaku untuk bermain melalui proses-proses demokratis ke arah yang lebih substantif memiliki makna penting.³⁴ Jangan sampai ada pelaku, baik individu maupun kelompok yang menyalahi aturan-aturan main dalam demokrasi. Di antara kelembagaan demokrasi yang harus kita cermati adalah peran dari Partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat. Partai politik dituntut melakukan reposisi peran dan fungsi dalam internal partai masing-masing untuk mengawal konsolidasi demokrasi saat ini.

³¹ Saiful Mujani, *Muslim Demokrat, Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, hal. 323

³² Sumber data KPU dan Kompas 10 Mei 2009 diolah oleh UNIS Tangerang, penulis dapat dari Soebagio, *Distorsi dalam Transisi Demokrasi di Indonesia*. Dalam bentuk makalah ilmiah.

³³ Robert A. Dahl, *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol*, Penerjemah Sahat Simamora (Jakarta: CV. Rajawali, 1985) hal. 1

³⁴ A.A. Sahid Gatara dan Moh. Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian* (Bandung: Pustaka SETIA, 2007) hal. 194

Selain itu, peran dari Pers sangat dibutuhkan dalam akses informasi dan sebagai media untuk melakukan kritikan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

Pembangunan lembaga kepartaian, merupakan tujuan utama bagi stabilitas politik dalam peranan mencapai penguatan nilai-nilai demokrasi (konsolidasi demokrasi). Menurut Samuel P. Huntington, demokrasi yang terkelola mempersyaratkan adanya penguatan *institusionalisasi* atau pelembagaan elemen-elemen demokrasi.³⁵ Dalam proses konsolidasi demokrasi, partai politik harus kembali menata format kelembagaan partai, di antaranya, Partai politik harus memiliki unsur yang berbeda dari partai politik lain, menata program-program pro rakyat yang jelas, menguatkan ideologi partai agar tidak mudah masuk dalam arus pragmatisme kekuasaan sesaat dan memainkan fungsi-fungsi dan peran partai politik dengan baik.³⁶

PENUTUP

Indonesia memiliki perjalanan panjang dalam demokratisasi, akan tetapi pada akhirnya Indonesia sudah berada pada tahapan konsolidasi demokrasi. Karena indikator-indikator yang disebutkan oleh Larry Diamond telah terdeteksi. Diantaranya, telah terciptanya kepemimpinan yang kuat dalam eksekutif sehingga tidak akan menimbulkan instabilitas kepemimpinan nasional. Kemudian, tingkat partisipasi yang cukup tinggi dari individu maupun kelompok dalam mengawal proses konsolidasi demokrasi. Tidak adanya diskriminasi maupun sikap represif terhadap individu kemudian memunculkan kebebasan berekspresi yang menjadi nilai dasar dari demokrasi tersebut. Fungsi kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat berjalan terus dengan progresifitas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai masyarakat yang kritis terhadap pemerintah.

Selanjutnya, ketertarikan masyarakat terhadap politik, dengan 70,1% suara pada pemilu 2009 cukup mempunyai nilai yang signifikan dalam konsolidasi demokrasi. Alhasil partisipasi politik masyarakat Indonesia masih terhitung cukup tinggi.

Kemudian, kelembagaan demokrasi yang harus terus-menerus di tata dengan baik, mengisyaratkan bahwa demokrasi di Indonesia tidak berjalan di tempat. Semua itu, untuk menarik minat masyarakat untuk “bermain” sesuai koridor demokrasi. Di antara

³⁵Samuel P. Huntington, *Tertib Politik pada Masyarakat yang Sedang Berubah*, penerjemah Sahat Simamora dan Suryatim (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004) hal. 487

³⁶ Prof. Bahtiar Effendi yang disampaikan saat kuliah PPI VII pada mata kuliah Pendekatan-Pendekatan Politik Islam Indonesia,

kelembagaan demokrasi, di antaranya; Partai Politik, LSM, Organisasi Sosial dan lain sebagainya. Kelembagaan ini penting untuk menjaga stabilitas agar sesuai dengan nilai-nilai dasar dari demokrasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalla, Ulil Abshar. (ed.) *Islam & Barat: Demokrasi dalam Masyarakat Islam*. Jakarta: FNS Indonesia, 2002.
- Alfian dan Sjamsuddin, Nazaruddin. *Profil Budaya Politik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991.
- Apter, David E. *Pengantar Analisa Politik*, penerjemah Setiawan Budi. Jakarta: LP3S, 1987
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia, 1985
- Budiman, Arief. *Teori Negara: Negara, kekuasaan dan Ideologi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997
- Dahl, Robert A. *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.
- _____ *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol*, Penerjemah Sahat Simamora. Jakarta: CV. Rajawali, 1985.
- Gatara, A.A. Sahid dan Said, Moh. Dzulkiah. *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Bandung: Pustaka SETIA, 2007.
- Hardiman, F. Budi *Demokrasi Deliberatif*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Horowitz, Louis Irving. *Revolusi, Militerisasi dan Konsolidasi Pembangunan*, Penerjemah Sahat Simamora. Jakarta: PT Bina Aksara, 1985
- Huntington, Samuel P. *Tertib Politik pada Masyarakat yang Sedang Berubah*, penerjemah Sahat Simamora dan Suryatim. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Juliantara, Dadang. *Negara Demokrasi Untuk Indonesia*. Jawa Tengah: Pondok Edukasi, 2002.
- Lewis, Bernard. *et.al*. *Islam Liberalisme Demokrasi Membangun Sinerji Warisan Sejarah, Doktrin dan Konteks Global*, penerjemah Mun'im A. Sirry. Jakarta: Paramadina, 2002
- Liddle R. William. *Islam, Politik dan Modernisasi*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 1997.
- Mujani, Saiful. *Muslim Demokrat, Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

- Outhwaite, William. (ed.) *Kamus Lengkap Pemikiran Sosial modern*, Penerjemah Tri Wibiwo. Jakarta: Kencana, 2008
- O'Donnell, Guillermo. dan Scmitter, Phillippe C. *Transisi Menuju Demokrasi: Kasus Eropa Selatan*, Penerjemah Hartono. Jakarta: LP3S, 1992.
- Purwoko, Dwi. dkk, *Negara Islam: Percikan Pemikiran: H. Agus salim, KH. Mas Mansyur, KH. Hasyim Asy'ari dan Muhammad Natsir*. Jakarta: PT Permata Artistika Kreasi, 2001
- _____ *Nasionalis Islam vs Nasionalis Sekuler*. Jakarta: PT Permata Artistika Kreasi, 2001.
- Rousseau, Jean Jaques. *Perihal Kontrak Sosial*, Penerjemah Ida Sundari. Jakarta: PT Dian Rakyat, 1989.
- Sahdan, Gregorius. *Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto*. Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2004.
- Sirry, Mun'im A. *Dilema Islam Dilema Demokrasi: Pengalaman Baru Muslim Dalam Transisi Indonesia*. Bekasi: Gugus Press, 2002.
- Suhelmi, Ahmad. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Syafe'i, Inu Kencana. dan Azhari. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Syamsudin, M. Din. *Islam dan Politik: Era Orde Baru*. Jakarta: Logos, 2001.
- Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Urbaningrum, Anas. *Islamo-Demokrasi Pemikiran Nurcholish Majid*. Jakarta: Republika, 2004.
- Yatim, Badri. *Soekarno, Islam dan Nasionalisme* Jakarta: Logos, 1999.